

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan masyarakat dapat hidup dengan layak karena terpenuhinya kebutuhan dasar. yang mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, keterlibatan dalam kehidupan sosial, serta jaminan keamanan. Meski demikian, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dalam pembangunan manusia berkualitas berupa stunting (Ginting Suriani et al., 2022). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020–2024 mencatatkan bahwa stunting menjadi isu prioritas nasional (Octavia et al., 2023). Pada tahun 2021 melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa di Indonesia prevalensi mencapai 24,4%. Sebagai wujud komitmen menurunkan stunting, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, didalam Perpres ini terdapat tim percepatan penurunan stunting yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana, yang bertujuan memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan kelembagaan dengan menetapkan suatu. Ketua pengarah adalah Wakil presiden dengan Menko PMK, sementara itu untuk pelaksana Kepala BKKBN di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan.

Tahun 2022 SSGI merilis prevalensi stunting di Indonesia menurun menjadi 21,6% (Kementerian Kesehatan, 2023). Indonesia mengalami penurunan stunting dari tahun ke tahun, hal ini sejalan pada tahun 2023 stunting tercatat sebesar

17,8%.(Kementerian Kesehatan, 2023). Pada Rapat Kerja Nasional BKKBN Tahun 2023, Joko Widodo selaku Presiden Indonesia saat itu menjelaskan bahwa stunting tidak hanya berkaitan dengan masalah tinggi badan anak, tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap rendahnya kemampuan belajar, gangguan perkembangan mental, serta risiko munculnya penyakit-penyakit kronis (Kementerian Kesehatan, 2023). Dalam rapat kerja tersebut Joko Widodo mengatakan:

“Oleh sebab itu target yang saya sampaikan 14% di tahun 2024. Ini harus bisa kita capai, saya yakin dengan kekuatan kita bersama semuanya bisa bergerak. Angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama,” (<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>, diakses pada Jumat, 29 November, 2024).

Target stunting pada tahun 2024 harus menjadi 14%, oleh karenanya perlu perlu adanya kerja sama antar lembaga untuk memudahkan menyelesaikan persoalan stunting. Berdasarkan pada pemaparan prevalensi stunting di Indonesia dari tahun 2021-2024, berikut merupakan diagram batang yang menggambarkan prevalensi stunting pada anak balita di Indonesia.

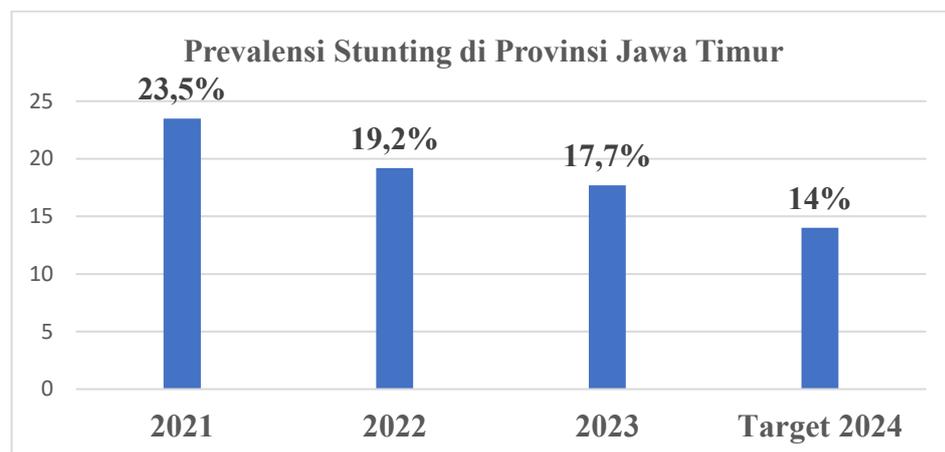
Tabel 1.1 Prevalensi Stunting di Indonesia Tahun 2021-2024



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), 2021-2023

BKKBN menerangkan pada tahun 2021 terdapat 5 provinsi dengan stunting tertinggi di Indonesia, berdasarkan hasil SSGI provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten (Prihatini et al., 2022). Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021 stunting Provinsi di Jawa Timur mencapai 23,5% (Mukodi & Rahmawati, 2023). Selanjutnya tahun 2022 prevalensi stunting di Provinsi Jawa Timur mencapai 19,2% (Mukodi & Rahmawati, 2023). Tahun 2023 stunting di Jawa Timur berada pada angka 17,7%, angka ini berada di bawah rata-rata nasional yaitu 21,6% (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2024). Sementara untuk tahun 2024 sebagaimana yang telah disampaikan presiden Jokowi pada saat Rapat Kerja Nasional BKKBN target stunting secara nasional harus 14%. Berikut merupakan prevalensi stunting pada tahun 2021-2023 dan target nasional pada tahun 2024 di Jawa Timur bila disajikan dalam diagram batang.

Tabel 1.2 Prevalensi Stunting di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2024



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), 2021-2023

Muhadjir Effendy, selaku Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), dikarenakan populasi di Provinsi Jawa Timur sangat besar maka Jawa Timur menjadi fokus utama pemerintah dalam

upaya penurunan stunting (Novrizaldi, 2023). Dikutip pada laman berita *online* Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Muhadjir Effendy selaku menteri Menko PMK pada Roadshow Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa:

"Walaupun prevalensi stunting di Jawa Timur tidak besar, tetapi karena populasinya di Jawa Timur besar, maka efek agregatnya akan sangat besar untuk tingkat nasional. Karena itu Jawa Timur memang menjadi perhatian utama kita," (<https://stunting.go.id/prevalensi-stunting-tiga-kabupaten-di-jatim-masih-di-atas-30-persen>, diakses pada Sabtu, 30 November 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut, meskipun prevalensi stunting di Provinsi Jawa Timur selalu menurun setiap tahunnya, namun jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur banyak sehingga secara jumlah kasus anak stunting di Provinsi Jawa Timur masih banyak.

Tahun 2021 terdapat Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dengan presentase stunting diatas Provinsi Jawa Timur, Kabupaten dan Kota tersebut yakni, Kota Surabaya 28,9%, Kabupaten Mojokerto 27,5%, Kabupaten Malang 25,6%, Kota Malang 25,7%, dan Kabupaten Nganjuk sebanyak 25,3% (Kusnandar, 2022). Berikut tabel 5 wilayah di Jawa Timur dengan prevalensi balita stunting terbesar di Jawa Timur Tahun 2021.

Tabel 1.3 5 Wilayah di Jawa Timur dengan Prevalensi Balita Stunting Terbesar di Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Presentase
Kota Surabaya	28,9%
Kabupaten Mojokerto	27,4%
Kabupaten Malang	25,6%
Kota Malang	25,7
Kabupaten Nganjuk	25,3%

Sumber: Databooks, 2022

SSGI tahun 2021 menunjukkan bahwa Kota Surabaya menjadi salah satu kota dengan prevalensi balita stunting diatas Provinsi Jawa Timur. Prevalensi balita stunting di Kota Surabaya tahun 2021 mencapai 28,9%. Pemerintah Kota Surabaya terus mengupayakan berbagai kebijakan dan program untuk dapat menurunkan angka balita stunting di Kota Surabaya (Sari et al., 2024). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya digunakan sebagai dasar hukum upaya menurunkan stunting. Sebagaimana yang diungkap oleh Walikota Surabaya Eri Cahyadi pada saat menerima kunjungan Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Berkelanjutan, tindak lanjut dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 melalui:

“sejauh ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah berjibaku menggempur stunting dengan berbagai cara, mulai pemberian gizi pada balita, memberikan penyuluhan pra nikah kepada calon pengantin (catin), pemberian obat tambah darah pada remaja perempuan, open defecation free (ODF) atau bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan sebagainya. (<https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013091587/surabaya-bakal-jadi-percontohan-nasional-setelah-berhasil-menurunkan-stunting-ini-rahasiannya>, diakses pada Senin, 2 Desember 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas, Walikota Surabaya Eri Cahyadi berharap upaya penanganan stunting di Kota Surabaya dapat diterapkan dengan baik. Pemerintah Kota Surabaya merencanakan Kota Surabaya menjadi kota *zero stunting*. Adanya kebijakan penurunan stunting atau *zero stunting* ini merupakan implementasi kebijakan yang digagas oleh Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya. Semenjak menjabat menjadi Walikota Surabaya Eri Cahyadi yang sejak awal telah langsung memfokuskan kebijakannya pada penanganan terkait dengan kasus stunting yang ada di Kota Surabaya (Jasmine, 2024). Penanganan terkait dengan kasus stunting ini sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Presiden terkait dengan pentingnya

penanganan stunting karena hal ini menyangkut tentang masa depan generasi penerus bangsa di Indonesia menuju generasi emas di tahun 2045.

Bobby Soemiarsono selaku Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dalam kegiatan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur (DWP Jatim) mengatakan bahwa:

"Mengasuh anak dengan baik dan benar harus dipelajari, dilatih, dan diimplementasikan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya," (<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pj-sekdaprov-jatim-permasalahan-stunting-tidak-hanya-soal-pemenuhan-gizi>, diakses pada Senin, 2 Desember 2024).

Berdasarkan pemaparan diatas, Bobby Soemiarsono berpendapat bahwa fokus penanganan stunting tidak hanya tentang masalah gizi, tetapi pada pola asuh. Tingginya angka stunting tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan asupan gizi sejak dalam kandungan hingga setelah kelahiran, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pengasuhan. Oleh karena itu, penanganan stunting perlu dilakukan melalui perbaikan pola makan dan pola asuh anak (Azrimaidaliza et al., 2020). Rendahnya pengetahuan ibu terkait pola pengasuhan anak menjadi salah satu faktor tingginya stunting (Octavia et al., 2023).

Tahun 2024 Pemerintah Kota Surabaya meraih penghargaan Kinerja Tahun Berjalan kategori penurunan stunting tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dari pemerintah pusat, penghargaan berupa Insentif Fiskal sebesar Rp 6,45 miliar.

Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan:

"Insentif stunting akan digunakan untuk penanganan gizi buruk dan stunting, karena kita berkomitmen untuk membentuk SDM sehat supaya bisa menjadi pemimpin masa depan," (<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pemkot-surabaya-raih-insentif-fiskal-penurunan-stunting-wali-kota-eri-komitmen-tingkatkan-sdm>, diakses pada Senin, 6 Januari 2025).

Eri Cahyadi selaku walikota Surabaya menyampaikan bahwa insentif tersebut akan digunakan untuk mempercepat penanganan stunting serta gizi buruk. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan SDM yang sehat dan berkualitas.

Nanik Sukristina selaku kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyatakan bahwa penghargaan Insentif Fiskal diberikan sebagai apresiasi atas kinerja, inovasi, dan kontribusi dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Nanik mengatakan bahwa:

“..dan upaya sensitif lainnya seperti, penguatan audit kasus stunting, perbaikan pola asuh salah satunya melalui Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)” (<https://kominform.jatimprov.go.id/berita/pemkot-surabaya-raih-insentif-fiskal-penurunan-stunting-wali-kota-eri-komitmen-tingkatkan-sdm>, diakses pada Senin, 6 Januari 2025).

Nanik Sukristina selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengatakan bahwa Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai program dalam upaya penurunan stunting di Kota Surabaya, salah satunya melalui perbaikan pola asuh melalui program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH).

Dinas Kesehatan Kota Surabaya mencatat jumlah stunting di Kota Surabaya tahun 2022 mencapai 1954 balita, dari yang sebelumnya pada tahun 2021 jumlah balita stunting mencapai 6.722 balita. Selanjutnya pada tahun 2023 total kasus stunting di kota Surabaya turun mencapai 982 balita, dan data terakhir yakni tahun 2024 terdapat 858 balita mengalami stunting. Keberhasilan penurunan angka stunting ini menjadikan Kota Surabaya sebagai kota yang minim menyumbangkan angka stunting di Provinsi Jawa Timur, yakni hanya sebesar 4,8% (Sari et al., 2024). Berikut merupakan jumlah stunting pada tahun 2021-2024 kota Surabaya.

Tabel 1.4 Jumlah Stunting di Kota Surabaya Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2021-2024

Penurunan angka stunting di Kota Surabaya tidak lepas dari peran aktif Pemerintah Kota Surabaya dalam menciptakan regulasi yang mendukung upaya penurunan stunting, salah satunya melalui Perwali Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting (Mukodi & Rahmawati, 2023). Penurunan stunting pada tahun 2021 ke tahun 2022 sangat signifikan hal ini dikarenakan Walikota Surabaya Eri Cahyadi menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas utama sejak awal masa jabatannya (Hendriana, 2023). Tahun 2021 tepatnya Bulan Desember Pemerintah Kota Surabaya menargetkan Kota Surabaya *zero stunting*, untuk mewujudkannya dilakukan beberapa strategi untuk menghapuskan kasus stunting pada balita di Kota Surabaya dengan berbagai cara antara lain melakukan pendataan kesehatan calon pengantin (catin) untuk mendeteksi risiko kekurangan gizi sejak dini. Pendataan dilakukan oleh masing-masing Kader Surabaya Hebat (KSH) di setiap kelurahan, pendataan melalui aplikasi sayang warga. Aplikasi sayang warga merupakan program Pemerintah Kota Surabaya berbasis web pelayanan yang digunakan untuk mendata warga miskin yang membutuhkan

intervensi dari pemerintah, intervensi ini memuat berbagai sasaran diantaranya balita gizi buruk, stunting, rumah tidak layak huni, lansia dan lain sebagainya (Permatasari, 2023). Dalam mewujudkan *zero stunting* Pemerintah Kota Surabaya menciptakan berbagai program inovatif yang terintegrasi salah satunya dengan program edukasi bagi orang tua tentang pola asuh yang baik dan pentingnya gizi seimbang untuk anak melalui program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH).

Program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) merupakan program berupa Pendidikan informal dalam mengurangi angka stunting pada balita yang disebabkan oleh pola pengasuhan yang tidak tepat (Putri Salsa & Puspaningtyas, 2024). Di Kota Surabaya, pelaksanaan SOTH dijalankan oleh DP5A, yang bekerja sama dengan Kader Surabaya Hebat (KSH) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di masing-masing kelurahan. Peraturan mengenai SOTH telah diatur dalam Perwali Nomor 106 Tahun 2023 Tentang SOTH, yang bertujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap program SOTH. Pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwa implementasi program SOTH dilaksanakan untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai wilayah "*zero stunting*" (Karfen & Anisykurlillah, 2024).

Pada awal pembentukannya SOTH di Surabaya terdapat SOTH percontohan yang berasal dari Bina Keluarga Balita (BKB) tepatnya di Kelurahan Pucang Sewu dengan nama Bina Keluarga Balita Pucang Kencana. SOTH dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan pola asuh terhadap anak sehingga orang tua mengetahui cara mengasuh anak dengan baik. Program ini diikuti oleh orang tua

yang memiliki anak balita dengan mengikuti pertemuan selama 7 kali yakni selama 2 bulan dengan 12 materi. Pada setiap satu kali pertemuan terdapat dua materi yang disampaikan oleh pihak Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, Kader Surabaya Hebat (KSH) Kelurahan Pucang Sewu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan Pucang Sewu dan mahasiswa, materi akan disampaikan oleh pemateri di bidangnya masing-masing. Pada Kelurahan Pucang Sewu terdapat 6 orang pengelola jalannya program SOTH yang terdiri dari gabungan PKK Kelurahan dan Kader Surabaya Hebat (KSH), 6 orang pengelola tersebut melakukan tugas memaparkan materi, mengoreksi hasil pretest dan *post test*, serta menjaga dan mengajak bermain balita para peserta SOTH. Sebelum materi disampaikan peserta SOTH akan diberikan *pretest* yang berisi pertanyaan terkait tentang materi yang akan disampaikan, *pretest* digunakan untuk mengetes apakah peserta telah mengenali materi yang akan disampaikan atau belum mengenali materi yang akan disampaikan. Setelah dilakukan pemaparan materi maka akan dilakukan sesi tanya jawab dengan pemateri dan sesi diskusi bersama terkait materi yang telah disampaikan. Kemudian sebelum program SOTH selesai disetiap penyampaian materi maka akan dilakukan *post test* bagi peserta SOTH untuk mengukur pemahaman terkait materi yang telah disampaikan. *Post test* tersebut akan dinilai dan pada setiap penyampaian materi peserta dengan nilai *post test* tertinggi akan mendapatkan hadiah, selain itu *post test* akan diakumulasikan semenjak pertemuan pertama hingga pertemuan akhir sebagai syarat kelulusan program bagi para peserta. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan beberapa

peserta SOTH yang baru mengikuti program mengaku bahwa baru mengetahui adanya program ini, selain itu kurangnya jumlah pengelola program yang terlibat dalam SOTH, yang mana hanya 6 orang dengan berbagai tugas seperti melakukan pemaparan materi, mengoreksi hasil *pretest* dan *post test*, dan menjaga anak-anak peserta SOTH yang jumlahnya lebih dari 10 anak balita. Program SOTH yang dilakukan di Kelurahan Pucang Sewu ini belum dilakukan disemua RW yang ada, SOTH hanya dilakukan pada 3 RW dari 8 RW yang ada. Selain itu sulitnya mencari peserta pada program SOTH di Kelurahan Pucang Sewu.

Pada penelitian sebelumnya terkait program SOTH telah banyak peneliti terdahulu yang membahas program SOTH pada ranah implementasi, misalnya pada penelitian yang dilakukan (Karfen & Anisykurlillah, 2024) memiliki fokus tentang implementasi SOTH guna mendukung penurunan stunting di Kelurahan Lakarsantri Kota Surabaya, pada penelitian yang dilakukan oleh (Saputriani & Hartono, 2023) memiliki fokus tentang implementasi SOTH guna mendukung penurunan stunting di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dan pada penelitian yang dilakukan oleh (Putri Salsa & Puspaningtyas, 2024) memiliki fokus tentang SOTH dalam mewujudkan balita tanpa stunting di Kelurahan Karangpoh Kota Surabaya. Berdasarkan pada ulasan beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa program SOTH dapat membantu penurunan angka stunting di Kota Surabaya. Namun, pada penelitian terdahulu tentang program SOTH masih belum mbingkai terkait dengan fokus efektivitas program terhadap penurunan stunting di Kota Surabaya khususnya di Kelurahan Pucang Sewu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas program SOTH

dengan menggunakan teori efektivitas menurut Campbell J.P dalam Mutiarin & Zaenudin, (2021) dengan 5 indikator yaitu 1) Keberhasilan program, 2) Keberhasilan sasaran, 3) Kepuasan Terhadap Program 4) Tingkat input dan output. 5) Pencapaian tujuan menyeluruh. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) Dalam Penurunan Stunting di Kelurahan Pucang Sewu Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menarik sebuah permasalahan tentang “Bagaimana Efektivitas Program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) Dalam Penurunan Stunting di Kelurahan Pucang Sewu Kota Surabaya?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Efektivitas Program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) Dalam Penurunan Stunting di Kelurahan Pucang Sewu Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada uraian tujuan penulisan penelitian diatas, penulis memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan perbandingan atau tolak ukur dan referensi bagi peneliti lain dimasa mendatang. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk

penelitian yang akan datang. Serta diharapkan memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya rumpun ilmu Administrasi Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Efektivitas Program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) Dalam Penurunan Stunting di Kelurahan Pucang Sewu Kota Surabaya.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diharapkan untuk digunakan sebagai kajian literatur yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya.